



**KABUPATEN BADUNG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2022**

**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2022**



BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 115/051/HK/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 76/051/HK/2021 TAHUN  
2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Bupati Nomor 76/051/HK/2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Badung tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 76/051/HK/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Bupati Nomor... Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2022 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Susunan sistematika Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun sebagai berikut :  
Bab I. Pendahuluan  
Bab II. Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022  
Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan PD  
Bab IV. Penutup
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 30 Agustus 2022

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

## DAFTAR ISI

Halaman

### KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 115/051/HK/2022 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022 .....</b>	<b>5</b>
2.1 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung .....	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung .....	11
<b>BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG .....</b>	<b>14</b>
Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2022 .....	14
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>20</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2021 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022 .....	6
Tabel 3.1	Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2022 Kabupaten Badung .....	15

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 115/051/HK/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2022**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2022 merupakan dokumen rencana pembangunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung periode Tahun 2022 yang penyusunannya masih berpedoman pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2021- 2026 dan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Perubahan Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Perubahan Renja memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat. Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah.

Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung terutama dalam mendukung program prioritas pembangunan pertanian Kabupaten Badung yang dirumuskan dalam Visi Pemerintah Kabupaten Badung.

### **1.2. Landasan Hukum**

Dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2022 adalah berbagai peraturan dokumen perencanaan lainnya, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2022 adalah untuk menentukan arah dan langkah kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung pada bidang pertanian di Tahun 2022 serta mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program, kegiatan dan subkegiatan prioritas pembangunan pertanian di Kabupaten Badung

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2022 adalah :

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2022 dengan berdasarkan pada perubahan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2022 dan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022
- c. Menggambarkan kebijakan kinerja yang akan ditransformasikan kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten

Badung sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2022.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

##### **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

##### **Bab II. Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022**

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II

##### **Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan PD**

Bab ini berisi perubahan rencana kerja dan rencana pendanaan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung pada Tahun 2022

##### **Bab IV. Penutup**

Bab ini berisi uraian penutup dari Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2022

**BAB II**  
**EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN**  
**BADUNG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022**

**2.1. Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022**

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Hasil evaluasi periode pelaksanaan triwulan II Tahun 2022 Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022  
Kabupaten Badung

Nama PD : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2021)
					6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2										
2	9									
2	9	3								
2	9	3	2.01							
2	9	3	2.01	1						
2	9	3	2.01	2						
2	9	3	2.04							
2	9	3	2.04	2						
3										
3	27									
3	27	1								
3	27	1	2.01							
3	27	1	2.01	1						
3	27	1								
3	27	1	2.01	7						
3	27	1	2.02							
3	27	1	2.02	1						
3	27	1	2.06							

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan				
					Target Renja PD Tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	1270 Buah	13 paket	13 paket	100	254 Buah	267 Buah	21,0
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor yang tersedia	3075 Buah	12 Bulan	12 Bulan	100	615 Buah	627 Buah	20,4
3	27	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	3495 Buah	12 Bulan	12 Bulan	100	699 Buah	711 Buah	20,3
3	27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan dekorasi pada hari-hari tertentu yang tersedia	235 Buah				47 Buah	47 Buah	20
						Jumlah Kebutuhan sarana upacara keagamaan yang tersedia	309755 Soroh	12 Bulan	12 Bulan	100	61951 Soroh	61963 Soroh	20,00
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan yang tersedia	6295 Buah	12 Bulan	12 Bulan	100	1259 Buah	1271 Buah	20,19
						Jumlah kebutuhan penggandaan yang tersedia	140000 lembar				28000 lembar	28000 lembar	20
3	27	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kebutuhan Bahan bacaan (Surat kabar/Majalah) yang tersedia	4920 Eksemplar	676 exp/bln	676 exp/bln	100	984 Eksemplar	1660 Eksemplar	33,74
3	27	1	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>% Jasa penunjang urusan Pemerintah daerah yang dibayarkan (tepat waktu)</b>	<b>100 %</b>				<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
3	27	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 10.000 yang tersedia	5000 lembar	620 Lembar	620 Lembar	100	1000 lembar	1620 lembar	32,4
						Jumlah Materai 3000 yang tersedia	1250 lembar	250 Lembar	250 Lembar	100	250 lembar	250 lembar	20
						Jumlah Materai 6000 yang tersedia	1250 lembar	250 Lembar	250 Lembar	100	250 lembar	250 lembar	20
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah sambungan telepon, air, listrik dan internet yang dipakai dan dibayar tagihannya	40 unit	40 rekening	40 rekening	100	40 unit	80 unit	200
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja non pegawai (Tenaga Kebersihan) yang dibayar upahnya	21 orang	21 orang	21 orang	100	21 orang	21 orang	100
						Jumlah THL yang dibayar honorariumnya	1 orang	1 orang	1 orang	100	1 orang	1 orang	100
3	27	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>% barang milik daerah dalam keadaan baik (mendapatkan pemeliharaan)</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang harus disamsat dan di-KIR	161 unit	160 Unit	160 Unit	100	161 unit	321 unit	199,38
3	27	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas yang harus mendapat pemeliharaan rutin/berkala dan BBM Operasional	161 unit	160 Kendaraan	160 Kendaraan	100	161 unit	321 unit	199,38
						Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang harus mendapat pemeliharaan rutin/berkala	250 unit				250 unit	250 unit	100
						Jumlah tenaga kerja non pegawai (sopir) yang terbayar upahnya	1 orang				1 orang	1 orang	100
3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/kantor yang harus mendapat pemeliharaan rutin/berkala	408 m2	12 Unit	12 Unit	100	408 m2	420 m2	102,9411765
						Jumlah Taman yang harus mendapat pemeliharaan rutin/berkala	180 m2				180 m2	180 m2	100
3	27	2			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
3	27	2	2.01		<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>% Efektivitas pemanfaatan sarana pendukung pertanian</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terpeliharanya kawasan Agro Techno Park Badung	1 Kawasan				1 Kawasan	1 Kawasan	100
						Jumlah Tenaga Operasional Sentra Temak Sobangan	25 Orang	25 Orang	25 Orang	100	25 Orang	25 Orang	100
						Jumlah Kios yang mendapat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	120 Kios	24 Kios	24 Kios	100	24 Kios	24 Kios	20

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan						
					Target Renja PD Tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2021)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pendampingan penggunaan sarana pertanian	65 Kelompok			13 Kelompok	13 Kelompok	20			
3	27	2	2.02		<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>% Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan</b>	<b>100 %</b>			<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>			
3	27	2	2.02	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Burung yang mendapatkan pemeliharaan dan perawatan/perawatan	35 ekor	35 ekor	35 ekor	35 ekor	105 ekor	300			
3	27	2				Jumlah laporan cacah jiwa ternak	60 laporan			12 laporan	12 laporan	20			
3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SPR yang dikelola	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100		
3	27	3			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>% Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik</b>	<b>75 %</b>			<b>60 %</b>	<b>120 %</b>	<b>160</b>			
3	27	3	2.03		<b>Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Prosentase pengelolaan sentra ternak sapi secara baik dan teratur</b>	<b>100 %</b>			<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>			
3	27	3	2.03	1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah pengadaan alat kerja	17 jenis	17 jenis	17 jenis	100	17 jenis	34 jenis	200		
						Jumlah pengadaan makanan ternak	11252950 kg	0	2290010 Kg	2250590 Kg	98,3	2250590 kg	4501180 kg	40	
						Jumlah pengadaan obat-obatan	30 jenis		19 jenis	19 jenis	100	30 jenis	49 jenis	163,3	
						Jumlah peralatan yang dipelihara	8 jenis				8 jenis	8 jenis	100		
						Jumlah sentra ternak sapi yang dikelola	1 unit				1 unit	1 unit	100		
						Jumlah tenaga kerja pemelihara ternak sapi yang terbayar upahnya	25 orang				25 orang	25 orang	100		
3	27	4			<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>% Angka kesakitan ternak atau hewan</b>	<b>5 %</b>			<b>5 %</b>	<b>3,8 %</b>	<b>76</b>	<b>5 %</b>	<b>8,8 %</b>	<b>176</b>
3	27	4	2.01		<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>% Hewan/ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan</b>	<b>46 %</b>			<b>45 %</b>	<b>45 %</b>	<b>100</b>	<b>45 %</b>	<b>90 %</b>	<b>195,65</b>
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah hewan / ternak yang diobati	10000 ekor				1000 ekor	1000 ekor	10		
3	27	4				Jumlah hewan / ternak yang dispraying	67500 ekor				8500 ekor	8500 ekor	12.59259259		
3	27	4				Jumlah hewan/ ternak yang divaksin	60000 ekor		33000 Ekor	15000 Ekor	45.45454545	25000 ekor	40000 ekor	66.66666667	
3	27	4	2.03		<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>% Sampel ternak/hewan beresiko yang diperiksa</b>	<b>2,5 %</b>			<b>2,5 %</b>	<b>2,5 %</b>	<b>100</b>	<b>2,5 %</b>	<b>5 %</b>	<b>200</b>
3	27	4	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan hasil pengambilan dan pemeriksaan sampel darah hewan dan otak anjing	2250 laporan sampel		12 Laporan	12 Laporan	100	450 laporan sampel	462 laporan sampel	20,53	
3	27	4	2.04		<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>% Tempat /lokasi pemotongan hewan, dan sampel yang diperiksa</b>	<b>100 %</b>			<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3	27	4	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah tempat/lokasi pemotongan hewan Hari Raya Galungan	62 lokasi				lokasi	0 lokasi	0 lokasi	0	
3	27	4				Jumlah tempat/lokasi pemotongan hewan Hari Raya Idul Adha	50 lokasi				lokasi	0 lokasi	0 lokasi	0	
3	27	4	2.04	3	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Jumlah RPH yang memenuhi persyaratan teknis	1 RPH	1 RPH	1 RPH	100	1 RPH	2 RPH	200		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-3 (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan					
					Target Renja PD Tahun n-2 (2021)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2021)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
3	27	4	2.04	4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel daging yang diambil dan diperiksa	2250 sampel				450 sampel	450 sampel	20	
					Pembelian Bahan Alat kerja	5 Paket					1	1	20	
3	27	5			<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	% Penanganan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100 %				100 %	100 %	200,00 %	200
3	27	5	2.01		<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	% Penanganan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100 %				100 %	100 %	200 %	200
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luasan lahan padi yang tertangari hama dan penyakit	2011,5 Hektar				405,5 Hektar	405,5 Hektar	20,16	
						Jumlah laporan serangan OPT yang tersedia	120 Kali Laporan				24	24	20	
3	27	7			<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	% Pemberdayaan peranan penyuluh pertanian	100 %				100 %	100 %	100	
						Persentase Pertumbuhan Kelompok Tani Agribisnis	100 %				100 %	100 %	100	
3	27	7	2.01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	% Kunjungan Penyuluh Ke Kelompok Tani	100 %				100 %	100 %	200 %	200
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah BPP yang dikelola	5 BPP				5 BPP	10 BPP	200	
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang didampingi	79 Kelompok				79 Kelompok	158 Kelompok	200	
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh dan tenaga teknis pertanian dan pangan yang terpenuhi biaya operasionalnya	57 orang				57 orang	109 orang	191,2280702	

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, kinerja Dinas Pertanian dan Pangan sampai saat ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, dimana tugas pokok dan fungsi telah terdistribusi secara optimal ke bidang-bidang dengan didukung sekretariat. Terdistribusinya pekerjaan dan pelayanan secara optimal, berkorelasi terhadap pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai misi yang harus diemban. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai kompetensi serta sarana, prasarana dan didukung pendanaan yang memadai, juga sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan PD. Dinas Pertanian dan Pangan hingga saat ini kinerja pelayanan telah berjalan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Sebagai gambaran target kinerja pelayanan PD yang telah dicapai pada Tahun 2021 dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan  
Kabupaten Badung Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
1	Meningkatnya luas tanam komoditi pertanian	a. Luas tanam komoditi padi, palawija dan hortikultura	19.475 Ha	20.975,29 Ha	115,64
2	Meningkatnya Produksi Padi, Palawija, Hortikultura, Kopi dan Kakao	a. Produktivitas Padi b. Produktivitas Cabai c. Produktivitas Kedelai d. Produksi Kopi e. Produksi Kakao	60,7 Kw/Ha 52,4 Kw/Ha 15,2 Kw/Ha 702,86 Ton 70,42 Ton	61,77 Kw/ha 41,7 Kw/ha 14,38 Kw/ha 702,86 Ton 70,42 Ton	101,76 79,58 94,61 100,00 100,00
3	Meningkatnya Aktivitas Agribisnis	a. Jumlah petani/kelompok yang produksi komoditasnya berkualitas industri	27 klp	22 Klp	81,48
4	Meningkatnya populasi ternak	a. Jumlah populasi ternak b. Jumlah Akseptor IB c. Jumlah Kasus Penyakit ternak	1.942.710 Ekor 5.150 Ekor 27.335 Ekor	1.942.710 Ekor 5.163 Ekor 14.301 Ekor	100,00 100,25 52,32
5	Meningkatnya pengelolaan perencanaan,pen	a. Capain realisasi anggaran Dinas Pertanian dan	90,00%	81,14%	90,15

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
	gembangan dan pelayanan yang mendukung sektor Pertanian	Pangan			
		b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan	84,23	0	Belum dinilai
		c. Jumlah kunjungan yang dilakukan oleh tenaga fungsional	5760 Kali	5760 Kali	100,00

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan

Potensi Kabupaten Badung sebagai daerah pertanian dan pangan selain didukung oleh potensi sumber daya alam, juga didukung oleh potensi sumber daya manusianya. Jumlah penduduk Kabupaten Badung menurut Data BPS Badung Tahun 2021 adalah 548.191 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 1309,83 jiwa/km<sup>2</sup>. Berdasarkan jenis kelaminnya terdiri dari laki-laki 276.556 jiwa dan perempuan 266.745 jiwa. Dari jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), sebanyak 367.619 jiwa di antaranya atau sekitar 10,7 % (39.303) bermata pencaharian pada sektor pertanian yaitu pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan (Sumber:Badung Dalam Angka 2021) Lahan sawah dan lahan kering merupakan faktor utama dalam usaha pertanian khususnya komoditas tanaman pangan dan perkebunan. Dengan berkembangnya kemajuan pembangunan di bidang industri jasa, khususnya pembangunan jasa akomodasi pariwisata yang juga merupakan sumber utama pendapatan daerah Kabupaten Badung, tentunya banyak menghabiskan ruang dan lahan untuk dibangun, demikian juga pembangunan gedung kantor, jalan dan prasarana/ sarana penunjang lainnya yang juga banyak membutuhkan lahan, hingga kini lahan sawah/kebun/ tegalan cenderung mengalami perubahan status dari tahun ke tahun terutama dari lahan pertanian ke non pertanian. Kondisi ini merupakan tantangan yang harus dihadapi, khususnya pada sektor pertanian tanaman pangan, sementara di lain pihak permintaan terhadap penyediaan pangan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan permintaan masyarakat, sebagai dampak dari peningkatan jumlah penduduk serta meningkatnya pendapatan masyarakat. Jumlah lahan sawah hingga akhir tahun 2022 tercatat 9.631 ha, dari sebelumnya tahun 2021 seluas 9.938 ha.

Selain isu alih fungsi lahan, adanya pandemi Covid-19 sangat berpengaruh tidak hanya terhadap eksistensi perkonomian tetapi memukul eksistensi sektor pertanian, jika perkembangan semakin meluas seiring dengan tidak disiplinya masyarakat dalam menerima himbauan pemerintah serta keterbatasan pemerintah dalam memaksimalkan pencegahan dan penanganan. Saat ini sektor pertanian menjadi tulang punggung ditengah upaya pemerintah menanggulangi wabah. Merebaknya kasus pandemi virus Covid-19 telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan di berbagai sektor, termasuk pada sektor pangan. Hambatan yang muncul dalam masalah distribusi dan logistik antar wilayah dan antar negara berpotensi untuk menurunkan ketersediaan pangan di dalam negeri. Selain itu Adanya kendala teknis dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi antara penyuluh pertanian dengan para petani akibat pandemi covid19 dapat menyebabkan penurunan angka produksi hasil pertanian

Berdasarkan kondisi seperti tersebut di atas, identifikasi permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Semakin meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat
2. Menurunnya tingkat kesuburan tanah
3. Lahan pertanian semakin berkurang
4. Debit air irigasi semakin berkurang
5. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pertanian
6. Masih minimnya minat generasi muda untuk menekuni sektor pertanian
7. Masih rendahnya daya saing produk pertanian
8. Kurangnya ketersediaan dan kontinuitas produk pertanian
9. Belum optimalnya pelaksanaan penerapan pola tanam
10. Masih adanya penyakit hewan menular.
11. Adanya refocusing anggaran akibat perubahan prioritas anggaran Kabupaten yaitu pada penanganan kesehatan pasca covid-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat
12. Rata-rata umur petani sawah diatas 50 tahun (kurang produktif)
13. Kendala teknis dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi antara penyuluh pertanian dengan para petani akibat pandemi covid19

Melihat permasalahan yang dihadapi, maka perlu dicarikan solusi terbaik untuk mengatasi segala tantangan/hambatan yang dapat mengancam keberlanjutan sektor pertanian dalam arti luas yang sejatinya adalah warisan budaya leluhur yang patut dipertahankan dan dilestarikan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Dalam kurun lima tahun ke depan, Dinas Pertanian dan Pangan akan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki secara optimal untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, tentunya

dengan kerjasama yang baik antara segenap jajaran PD dan pemangku kepentingan yang peduli dengan sektor pertanian di Kabupaten Badung, dimana keberadaannya perlu dipertahankan dan dilestarikan sepanjang masa.

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **Program, Kegiatan dan sub Kegiatan**

Perubahan Rencana Kerja (renja) program dan kegiatan pada tahun 2022 pada dasarnya dirancang dengan mengakomodasikan usulan dari masyarakat lewat mekanisme musrenbang yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten kemudian dipadukan/diformulasikan ke dalam usulan PD dengan klimaknya dibahas pada forum PD tingkat kabupaten dihadiri seluruh stake holder terkait guna memperoleh masukan secara holistik arah pembangunan Pertanian dan Pangan yang disepakati untuk direalisasikan pada tahun 2022, yang tentunya disesuaikan dengan tema pembangunan daerah, sasaran dan skala prioritas daerah.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung pada Perubahan Renja Tahun 2022 ini didukung dengan Program dan Kegiatan sebanyak 10 Program dan 26 Kegiatan serta 48 Sub Kegiatan dengan nilai usulan Rp 70.114.226.989,- dimana usulan tersebut anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Badung. Adapun rincian Program dan jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :





KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2022										Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023							
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber dana		Pagu Indikatif						
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = 12 - 11	(14)	(15)	(17)						
3.27	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% barang milik daerah dalam keadaan baik (mendapatkan pemeliharaan)	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik			100	%	12	Unit	1.258.128.458,00	1.722.775.770,00	464.647.312,00	APBD	APBDP	1.730.050.686,00				
3.27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang harus disamsat dan di-KIR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Aset Dinas (Barang milik Pemerinta h)	Aset Dinas (Barang milik Pemerinta h)	161	unit	161	Unit	58.923.000,00	58.923.000,00	-	APBD	APBDP	63.715.300,00			
3.27	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas yang harus mendapat pemeliharaan rutin/berkala dan BBM Operasional	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Aset Dinas (Barang milik Pemerinta h)	Aset Dinas (Barang milik Pemerinta h)	161	unit	161	Unit	1.093.999.154,00	1.094.004.566,00	5.412,00	APBD	APBDP	1.550.608.452,00			
3.27					Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang harus mendapat pemeliharaan rutin/berkala			250	unit	250	Unit			-	APBD	APBD					
3.27					Jumlah tenaga kerja non pegawai (sopir) yang terbayar upahny			1	orang	1	orang			-	APBD	APBD					
3.27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/kantor yang harus mendapat pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Aset Dinas (Barang milik Pemerinta h)	Aset Dinas (Barang milik Pemerinta h)	408	m2	12	Unit	105.206.304,00	569.848.204,00	464.641.900,00	APBD	APBDP	115.726.934,00			
3.27					Jumlah Taman yang harus mendapat pemeliharaan rutin/berkala			180	m2	1	Unit			-							
3.27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi Kopi Daging Telor)			100	%	13304112	Ton	6.039.342.198,00	12.126.581.612,00	6.087.239.414,00	APBD	APBDP	26.792.756.342,00			
3.27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	% Efektivitas pemanfaatan sarana pendukung pertanian	Jumlah kelompok yang memanfaatkan sarana pertanian sesuai ketentuan (Juknis)			100	%	127	Kelompok	5.744.235.798,00	8.550.193.291,00	2.805.957.493,00	APBD	APBDP	24.575.598.938,00			
3.27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terpeliharanya kawasan Agro Techno Park Badung	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Arboretum Kawasan ATP Kelompok Tani/subak	Arboretum Kawasan ATP Kelompok Tani/subak	Kab. Badung	Kab. Badung	Petang Belok Sidan	1	Kawasan	1	Laporan	1.654.594.397,00	2.936.853.460,00	1.282.259.063,00	APBD	APBDP	18.531.149.338,00
3.27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pendampingan penggunaan sarana pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Arboretum Kawasan ATP Kelompok Tani/subak	Arboretum Kawasan ATP Kelompok Tani/subak	Kab. Badung	Kab. Badung	Petang Belok Sidan	13	Kelompok	2	Laporan	4.089.641.401,00	5.613.339.831,00	1.523.698.430,00	APBD	APBDP	6.044.449.600,00
3.27	2	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	% Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan	Persentase Peningkatan populasi ternak komoditas unggulan (Sapi)			100	%	3	Persen	295.106.400,00	295.155.108,00	48.708,00	APBD	APBDP	820.809.661,00			
3.27	2	2.02	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Burung yang mendapatkan pemeliharaan dan perawatan/perawatan	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	SPR Petugas IB Kandang Burung dan burungny a	SPR Petugas IB Kandang Burung dan burungny a	Kab. Badung	Kab. Badung	Petang Belok Sidan	35	ekor	35	VUB	265.837.378,00	265.880.674,00	43.296,00	APBD	APBDP	181.872.197,00
3.27					Jumlah laporan cacah jiwa ternak			12	laporan												
3.27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SPR yang dikelola	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	SPR Petugas IB Kandang Burung dan burungny a	SPR Petugas IB Kandang Burung dan burungny a	Kab. Badung	Kab. Badung	Petang Belok Sidan	1	unit	1	Dokumen	29.269.022,00	29.274.434,00	5.412,00	APBD	APBDP	638.937.464,00
3.27	2	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Ternak yang memperoleh pembinaan				9	Kelompok			-	3.281.233.213,00	3.281.233.213,00	APBD	APBDP	1.396.347.743,00			
3.27			5	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia					1	Ton		-	3.281.233.213,00	3.281.233.213,00	APBD	APBDP	1.396.347.743,00			
3.27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	% Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	Luas Tanam Padi			60	%	2063667	Ha	2.754.988.411,00	2.915.202.919,00	160.214.508,00	APBD	APBDP	4.900.584.965,00			
3.27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian									-	239.290.158,00	239.290.158,00	APBD	APBDP	1.200.000.000,00			
3.27			3	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Usaha Tani (JUT) yang ditingkatkan	Jalan Usaha Tani yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara		Kelompok Tani/Suba k	1483	Meter	8	Unit	-	39.290.158,00	39.290.158,00	APBD	APBDP	1.200.000.000,00			

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2022										Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber dana		Pagu Indikatif		
					Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = 12 - 11	(14)	(15)	(17)			
3.27	3	2.03	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	Kelompok Tani/Suba k	Kab. Badung Petang Belok Sidan	1	Unit			200.000.000,00	200.000.000,00		APBD	APBDP	0		
3.27	3	2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pengelolaan sentra ternak sapi secara baik dan teratur Jumlah pengadaan alat kerja Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah sumber bibit Ternak yang dikelola Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan			100	%	1	Wilayah	2.754.988.411,00	2.675.912.761,00	(79.075.650,00)	APBD	APBDP	3.700.584.965,00	
3.27	3	2.03	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah pengadaan makanan ternak Jumlah pengadaan obat-obatan Jumlah peralatan yang dipelihara Jumlah sentra ternak sapi yang dikelola Jumlah tenaga kerja pemelihara ternak sapi yang terbayar upahnya					17	jenis	1	Laporan	2.754.988.411,00	2.675.912.761,00	(79.075.650,00)	APBD	APBDP	3.700.584.965,00
3.27	4		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	% Angka kesakitan ternak atau hewan	Persentase hewan/ternak dan hasil ikutannya yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan			5	%	100	Persen	1.554.042.355,00	1.813.092.795,00	259.050.440,00	APBD	APBDP	3.066.500.000,00	
3.27	4	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	% Hewan/ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan	Jumlah hewan/ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan			45	%	13	Laporan	1.300.580.947,00	1.559.675.579,00	259.094.632,00	APBD	APBDP	2.720.000.000,00	
3.27	4	2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah hewan / ternak yang diobati	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			1000	ekor	13	Laporan	1.300.580.947,00	1.559.675.579,00	259.094.632,00	APBD	APBDP	2.720.000.000,00	
3.27	4	2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	% Sampel ternak/hewan beresiko yang diperiksa	Jumlah Laporan sampel hewan/ternak yang diperiksa untuk pemenuhan standar			25	%	1	Laporan	126.787.636,00	126.793.048,00	5.412,00	APBD	APBDP	91.500.000,00	
3.27	4	2.03	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan hasil pengambilan dan pemeriksaan sampel darah hewan dan otak anjing	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner			450	laporan sampel	1	Laporan	126.787.636,00	126.793.048,00	5.412,00	APBD	APBDP	91.500.000,00	
3.27	4	2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	% Tempat/lokasi pemotongan hewan dan sampel yang diperiksa	Jumlah tempat/lokasi pemotongan Hewan/Ternak dan dagingnya yang diawasi			100	%	62	Lokasi	126.673.772,00	126.624.168,00	(49.604,00)	APBD	APBDP	255.000.000,00	
3.27	4	2.04	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Jumlah RPH yang memenuhi persyaratan teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan			1	RPH	1	Laporan	97.965.251,00	97.910.235,00	(55.016,00)	APBD	APBDP	131.000.000,00	
3.27	4	2.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel daging yang diambil dan diperiksa	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner			450	sampel	1	Dokumen	28.708.521,00	28.713.933,00	5.412,00	APBD	APBDP	124.000.000,00	
3.27	5		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	% Penanganan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	% Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggunglgi			100	%	100	Persen	91.657.476,00	123.668.217,00	32.010.741,00	APBD	APBDP	245.000.000,00	
3.27	5	2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	% Penanganan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Luas Areal Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanaulana			100	%	405	Ha	91.657.476,00	123.668.217,00	32.010.741,00	APBD	APBDP	245.000.000,00	
3.27	5	2.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Luasan lahan padi yang terdangani hama dan penyakit	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan			4055	Hektar	405	Ha	91.657.476,00	123.668.217,00	32.010.741,00	APBD	APBDP	245.000.000,00	
3.27	7		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	% Pemberdayaan peranan penyuluh pertanian	Persentase Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan			100	%	100	Persen	1.270.909.497,00	1.415.933.338,00	145.023.841,00	APBD	APBDP	2.208.141.766,00	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2022										Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber dana		Pagu Indikatif			
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = 12 - 11	(14)	(15)	(17)			
3.27	7	2.01		<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>		<b>% Kunjungan Penyuluh Ke Kelompok Tani</b>	<b>Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok tani</b>											
3.27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah BPP yang dikelola	Petugas Penyuluh Pertanian Kelompok Tani	Petugas Penyuluh Pertanian Kelompok Tani	Kab. Badung Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Kab. Badung Semua Kecamatan Semua Kelurahan	5 BPP	5 Unit	417.715.830,00	440.899.819,00	23.183.989,00	APBD	APBDP	720.504.354,00	
3.27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang didampingi	Petugas Penyuluh Pertanian Kelompok Tani	Petugas Penyuluh Pertanian Kelompok Tani	Kab. Badung Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Kab. Badung Semua Kecamatan Semua Kelurahan	79 Kelompok	79 Unit	162.509.312,00	253.666.784,00	91.157.472,00	APBD	APBDP	248.799.897,00	
3.27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh dan tenaga teknis pertanian dan pangan yang terpenuhi biaya operasionalnya	Petugas Penyuluh Pertanian Kelompok Tani	Petugas Penyuluh Pertanian Kelompok Tani	Kab. Badung Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Kab. Badung Semua Kecamatan Semua Kelurahan	57 orang	59 Unit	690.684.355,00	721.366.735,00	30.682.380,00	APBD	APBDP	1.238.837.515,00	

Keterangan :



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2022 merupakan rencana perubahan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) perubahan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2026. Renja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam anggaran perubahan 2022 sehingga pada akhir tahun pelaksanaan anggaran dapat terukur. Seluruh program dan kegiatan yang di rencanakan diharapkan akan bisa menutupi seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung yang di sesuaikan juga dengan pagu anggaran yang di terima Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022.

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN BADUNG

I WAYAN WIJANA, S.SOS, M.SI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 1961004 198812 1 001

---

BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA